



BUPATI MALUKU TENGAH

PENGUMUMAN

Nomor : 810/06/Peng/2024

TENTANG SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024

Dalam rangka mengisi lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI KEBUTUHAN

Alokasi Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sejumlah **547 (lima ratus empat puluh tujuh) formasi jabatan** yang terdiri atas :

- a. **Tenaga Teknis : 332 formasi**
- b. **Tenaga Kesehatan : 215 formasi**

Adapun rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan serta unit kerja penempatan sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

II. PENETAPAN KEBUTUHAN

Jenis penetapan Kebutuhan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi :

- a. **Kebutuhan Umum**, yang dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Kebutuhan Khusus**, yang dialokasikan khusus kepada Penyandang Disabilitas.

III. PERSYARATAN PELAMAR

A. Setiap pelamar Pegawai Negeri Sipil pada Kebutuhan Umum maupun Kebutuhan Khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun saat melamar pada *website* SSCASN;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dikecualikan bagi pelamar pada jabatan sebagai berikut :
 - a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. Dokter pendidik klinis; dan
 - c. Dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor.dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat mendaftar pada *website* SSCASN.

4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah SMA/ sederajat yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama;
 - b. pelamar dengan kualifikasi pendidikan perguruan tinggi dalam negeri harus memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
12. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

B. Persyaratan Khusus bagi Penyandang Disabilitas.

1. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
2. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada Kebutuhan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN, penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas.
3. Adapun pemilihan formasi khusus bagi pelamar penyandang disabilitas dapat diakses pada menu formasi saat melakukan pendaftaran pada *website* SSCASN.

IV. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Penetapan jadwal seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 sesuai Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 September s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 September s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 September s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 September s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 September s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 Oktober s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 Oktober s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 November s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 November s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 November s.d. 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 November s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 Desember s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 Desember s.d. 20 Desember 2024
22	Intergrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 Januari 2025 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 Januari 2025 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 Januari 2025 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 Januari 2025 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 Januari 2025 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari 2025 s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari 2025 s.d. 23 Maret 2025

Catatan : Jadwal bersifat tentative, jika ada perubahan akan diumumkan kemudian.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar diwajibkan untuk membuat akun baru di *website* SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>). Ketentuan ini juga berlaku bagi pelamar yang sudah pernah mendaftar atau mengikuti seleksi pada periode sebelumnya.
2. Pelamar melakukan pendaftaran secara online melalui *website* SSCASN dan mengikuti tata cara serta tahapan pendaftaran sesuai dengan petunjuk yang ada dalam *website* tersebut.
3. Pelamar mengunggah dokumen asli dalam bentuk digital (*file scan*) melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi SSCASN berdasarkan jenis formasi jabatan yang dilamar.
4. Setiap dokumen persyaratan yang diunggah wajib terbaca dengan jelas, tidak buram serta tidak terpotong yang terdiri dari :

- a. **Pas foto** formal terbaru, berwarna dengan latar belakang warna merah, dalam bentuk file jpg/jpeg.
- b. **Asli KTP** elektronik atau Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- c. **Surat Lamaran** yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, diketik komputer, kertas ukuran Folio/F4, sudah ditandatangani dan **dibubuhi e-meterai**, dalam bentuk file pdf (sesuai format sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini).
- d. **Ijazah Asli** dan **Ijazah Profesi Asli** (bagi jabatan yang mempersyaratkan) sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar dalam bentuk file pdf.
- e. **Transkrip Nilai Asli / Daftar Nilai Asli** sesuai kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar dalam bentuk file pdf.
- f. **Surat Pernyataan 5 Poin** yang sudah ditandatangani dan **dibubuhi e-meterai**, dalam bentuk file pdf (sesuai format sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini).
- g. **Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah Penempatan** yang sudah ditandatangani dan **dibubuhi e-meterai**, dalam bentuk file pdf (sesuai format sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini).
- h. Scan **sertifikat akreditasi perguruan tinggi** serta **sertifikat akreditasi program studi**, tangkapan layar **hasil pencarian akreditasi perguruan tinggi** dan **program studi pada website BAN-PT**, dan **hasil pencarian data mahasiswa pada website PDDIKTI** yang digabung dalam 1 file pdf.
- i. Asli **Surat Tanda Registrasi (STR)** yang masih berlaku saat mendaftar bagi pelamar CPNS formasi Tenaga Kesehatan sesuai jabatan yang mempersyaratkan dalam bentuk file pdf.
- j. Asli **Surat Keterangan Catatan Kepolisian** dari Polres setempat, Asli **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dan Asli **Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas** dari dokter rumah sakit pemerintah (**khusus pelamar jabatan Polisi Pamong Praja Pemula**) yang digabung dalam 1 file pdf.

VI. KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (baik PNS atau PPPK) pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 1 diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelamar pada pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan :
 - a. melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dan pada jenjang pendidikan yang sama saat seleksi tahun anggaran 2023;
 - b. dapat melamar pada jabatan dan instansi yang sama atau berbeda dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - c. memenuhi nilai ambang batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; serta
 - d. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
4. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada poin 3 memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun 2023, maka pelamar tersebut tidak perlu mengikuti SKD pada seleksi tahun 2024.
5. Jika pelamar tersebut memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024, maka nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD seleksi tahun 2024.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada lowongan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan :
 - a. telah memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun.
 - b. mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
 - c. dalam hal pelamar adalah ASN PPPK dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, maka wajib melaporkan diri ke Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Kantor BKPSDM dengan melampirkan surat izin mengikuti seleksi CPNS yang sudah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II mengetahui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai format surat sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.
 - d. persyaratan surat izin sebagaimana dimaksud pada poin c di atas sudah harus disampaikan kepada Panitia Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah **paling lambat tanggal 30 Agustus 2024.**
7. Khusus bagi pelamar formasi jabatan fungsional Tenaga Kesehatan berlaku ketentuan :
 - a. kualifikasi pendidikan yang menjadi acuan sebagai persyaratan melamar CPNS Tahun 2024 merujuk pada SE Dirjen Nakes Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024; dan
 - b. ketentuan persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi pelamar Tenaga Kesehatan berpedoman pada Kepmenpan RB Nomor 332 Tahun 2024 tentang Persyaratan STR untuk Melamar Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan ASN Tahun 2024.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 **tidak dipungut biaya (gratis).**
2. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Negeri Sipil atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindakan penipuan. Kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada siapapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Informasi resmi terkait tahapan seleksi Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dapat diakses melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan website resmi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui laman <https://maltengkab.go.id>.
4. Layanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dapat menghubungi Panitia Seleksi pada saat jam kerja.
5. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 bersifat **Mutlak**, dan **Tidak Dapat Diganggu Gugat.**

Diumumkan di Masohi

Pada Tanggal **19** Agustus 2024

Penjabat Bupati Maluku Tengah,



Dr. RAKIB SAHUBAWA, S.Pi., M.Si

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	215	
1.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RUMDAY
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NEGERI LIMA
3.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAAI
4.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TULEHU
5.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAUW
6.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
7.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SALEMAN
8.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SULI
9.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA
10.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
11.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOOI PAPERU
12.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JAZIRAH TENGGARA
13.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEHORU
14.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAHULAU
15.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA INSTALASI FARMASI
16.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI A
17.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PORTO HARIA
18.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA FARMASI
19.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
20.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAER
21.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA INSTALASI FARMASI
22.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPARUA
23.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA FARMASI
24.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEPA
25.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HILA
26.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HARUKU SAMETH
27.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
28.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LIANG
29.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HATTU
30.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HATAWANO
31.	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA SEKSI PELAYANAN MEDIS INSTALASI BEDAH SENTRAL
32.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TULEHU
33.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAIMU
34.	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMAHAI
35.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA
36.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NEGERI LIMA
37.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMILOUW
38.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA MAWAR KEBIDANAN
39.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEPA
40.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP KEBIDANAN
41.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA PUSKESMAS PEMBANTU PAA
42.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MASOHI
43.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEHORU
44.	BIDAN TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAHAI
45.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HILA
46.	BIDAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAUW
47.	BIDAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA PUSKESMAS PEMBANTU LISABATA TIMUR
48.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA
49.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA
50.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA MELATI RUANGAN ANAK
51.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA
52.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
53.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
54.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
55.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA
56.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA
57.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA
58.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA
59.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
60.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA
61.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA
62.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA
63.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA RADIOLOGI
64.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	RADIOLOGI		DINAS KESEHATAN RSUD BANDA
65.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
66.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
67.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
68.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEHORU
69.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HATTU
70.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HILA
71.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
72.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMETH
73.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAUW
74.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LETWARU
75.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TULEHU
76.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA
77.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
78.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAER
79.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAAI
80.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LIANG
81.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA DOKTER UMUM
82.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEPA
83.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAHULAU
84.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MASOHI
85.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MOROKAY
86.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMAHAI
87.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HARUKU SAMETH
88.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPARUA
89.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI B
90.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA
91.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HATTU
92.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAHULAU
93.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
94.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAUW
95.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NEGERI LIMA
96.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PORTO HARIA
97.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RUMDAY
98.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEPA
99.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMETH
100.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MOROKAY

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
101.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JAZIRAH TENGGARA
102.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMILOUW
103.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEHORU
104.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
105.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TEHUA
106.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPARUA
107.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOOI PAPERU
108.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAER
109.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WALLANG
110.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HARUKU SAMETH
111.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAIMU
112.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAYENI
113.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI B
114.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI A
115.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SALEMAN
116.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LIANG
117.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA EPIDEMIOLOG
118.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
119.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TULEHU
120.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NEGERI LIMA
121.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI A
122.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA INSTALASI GIZI
123.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEPA
124.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA MELATI RUANGAN ANAK
125.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAUW
126.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA PELAYANAN - IGD
127.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MASOHI
128.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA SEKSI PELAYANAN MEDIS INSTALASI GAWAT DARURAT
129.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
130.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI A
131.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA
132.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA ASOKA RUANG BEDAH
133.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA TERATAI KELAS 2
134.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAAI
135.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA PELAYANAN - IGD
136.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAIMU

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
137.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA PUSKESMAS PEMBANTU PAA
138.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASANEA PUSKESMAS PEMBANTU LISABATA TIMUR
139.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP BANGSAL VIP
140.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAUW
141.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA ASOKA RUANG BEDAH
142.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HILA
143.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
144.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA BOUGEANFIL INTEREN LAKI DAN WANITA
145.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HATAWANO
146.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEPA
147.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAPARUA
148.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP BANGSAL UMUM
149.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAIMU
150.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TAMILOUW
151.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA PELAYANAN - REKAM MEDIK
152.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MASOHI
153.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA LABORATORIUM
154.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAHAI
155.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SALEMAN
156.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAIMU
157.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA LABORATORIUM
158.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JAZIRAH TENGGARA
159.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI B
160.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA RUANG LABORATORIUM
161.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI
162.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WALLANG
163.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HATTU
164.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TULEHU
165.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAAI
166.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MASOHI
167.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HILA
168.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAUW
169.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HARUKU SAMETH
170.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAER
171.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	TERAMPIL		DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HITU
172.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA RADIOLOGI
173.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA ELEKTROMEDIK
174.	TEKNISI GIGI TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WAER
175.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TULEHU
176.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SULI
177.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI A
178.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELAUW
179.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS HILA
180.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
181.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU SAPARUA KESLING
182.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MASOHI
183.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI A
184.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ALLANG
185.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WALLANG
186.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NEGERI LIMA
187.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD BANDA SEKSI PELAYANAN MEDIS POLI GIGI
188.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PASAHARI A
189.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TULEHU
190.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LAIMU



panrb

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		332	
1.	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; D-IV STUDI DEMOGRAFI DAN CATATAN SIPIL ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
2.	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; D-IV PERIKANAN BUDIDAYA ; D-IV SAINS PERIKANAN ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; D-IV SUMBER DAYA AKUATIK ; D-IV SUMBER DAYA PERAIRAN ; D-IV TEKNOLOGI AKUAKULTUR ; D-IV TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; S-1 AGRIBISNIS PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN BUDIDAYA ; S-1 AGROBISNIS PERIKANAN ; S-1 AKUAKULTUR ; S-1 BUDIDAYA PERAIRAN ; S-1 SAINS PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 SUMBER DAYA AKUATIK ; S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN ; D-IV AGROBISNIS PERIKANAN ; D-IV AKUAKULTUR ; D-IV BIOTEKNOLOGI ; D-IV BUDIDAYA PERAIRAN ; D-IV ILMU PERIKANAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERIKANAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PEMBUDDIDAYA IKAN
3.	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN ; S-1 TEKNIK KESELAMATAN ; S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 KIMIA ; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
4.	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 HUKUM ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 KLIMATOLOGI ; S-1 MANAJEMEN BENCANA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIAT
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 STATISTIKA ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAN
9.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI SYARIAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT
10.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 STATISTIKA ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI SYARIAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; S-1 SISTEM INFORMASI		TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT
12.	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	S-1 LOGISTIK ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM ; S-1 TEKNIK PANGAN ; S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 SAINS PANGAN ; S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN ; S-1 MANAJEMEN LOGISTIK ; S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS ; S-1 MANAJEMEN AGRIBISNIS ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PERTANIAN ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 KEBIJAKAN PANGAN ; S-1 KEAMANAN PANGAN ; S-1 ILMU PANGAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU GIZI ; S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN ; S-1 GIZI MASYARAKAT ; S-1 GIZI ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA LINGKUNGAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 EKONOMI PERTANIAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN
13.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT
14.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG ANGGARAN
15.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
16.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
17.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
18.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
19.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI
20.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT
21.	DOKUMENTALIS HUKUM	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
22.	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	D-III ARSITEKTUR ; D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI ; D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG ; D-III GEOLOGI ; D-III PLANOLOGI ; D-III SURVEI DAN PEMETAAN ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNIK SIPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
23.	OPERATOR ALAT BERAT	D-III TEKNIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD PENGELOLAAN SAMPAH KEC. KOTA MASOHI
24.	OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
25.	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG ; D-III ALAT BERAT ; D-III ARSITEKTUR ; D-III DESAIN INTERIOR ; D-III GAMBAR ARSITEKTUR ; D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI ; D-III KONSTRUKSI GEDUNG ; D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-III KONSTRUKSI SIPIL ; D-III MEKATRONIKA ; D-III MESIN OTOMOTIF ; D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN ; D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI ; D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT ; D-III PEMELIHARAAN MESIN ; D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM ; D-III PEMELIHARAAN MESIN OTOMOTIF ; D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III PERTAMANAN ; D-III PLANOLOGI ; D-III REKAYASA FISIKA ; D-III REKAYASA LINGKUNGAN ; D-III REKAYASA MESIN ; D-III REKAYASA SIPIL ; D-III TEKNIK ALAT BERAT ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK FISIKA ; D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL ; D-III TEKNIK KONVERSI ENERGI ; D-III TEKNIK LINGKUNGAN ; D-III TEKNIK MESIN ; D-III TEKNIK MESIN INDUSTRI ; D-III TEKNIK OTOMOTIF ; D-III TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK ; D-III TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN ; D-III TEKNIK PERAWATAN MESIN ; D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III TEKNIK PLANOLOGI ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG ; D-III TEKNOLOGI SIPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG TATA RUANG
26.	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK PLANOLOGI ; D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III TEKNIK PERAWATAN MESIN ; D-III TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN ; D-III TEKNIK PERANCANGAN MEKANIK ; D-III TEKNIK PENGAIRAN ; D-III TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA ; D-III TEKNIK OTOMOTIF ; D-III TEKNIK MESIN INDUSTRI ; D-III TEKNIK MESIN ; D-III TEKNIK LINGKUNGAN ; D-III TEKNIK KONVERSI ENERGI ; D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL ; D-III TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-III TEKNIK FISIKA ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK ALAT BERAT ; D-III REKAYASA SIPIL ; D-III REKAYASA MESIN ; D-III REKAYASA LINGKUNGAN ; D-III REKAYASA FISIKA ; D-III PLANOLOGI ; D-III PERTAMANAN ; D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III PEMELIHARAAN MESIN OTOMOTIF ; D-III PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI LOGAM ; D-III PEMELIHARAAN MESIN ; D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT ; D-III PEMBUATAN PERALATAN DAN PERKAKAS PRODUKSI ; D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN ; D-III MESIN OTOMOTIF ; D-III MEKATRONIKA ; D-III KONSTRUKSI SIPIL ; D-III KONSTRUKSI JALAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		DAN JEMBATAN ; D-III KONSTRUKSI GEDUNG ; D-III INSTRUMENTASI DAN METROLOGI ; D-III GAMBAR ARSITEKTUR ; D-III DESAIN INTERIOR ; D-III ALAT BERAT		
27.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU POLITIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
28.	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
29.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; D-IV AGROBISNIS PERIKANAN ; D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; D-IV ILMU PERIKANAN ; D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; D-IV PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; D-IV PENYULUHAN PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERIKANAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PEMBUDIDAYA IKAN
30.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; D-IV ILMU PERIKANAN ; D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; D-IV AGROBISNIS PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; D-IV PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN ; D-IV PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN ; D-IV PENYULUHAN PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERIKANAN BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
31.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 FARMASI KLINIS ; D-IV KEPERAWATAN ANESTESILOGI ; D-IV KEBIDANAN ; D-IV FISIOTERAPI ; D-IV ANALIS KESEHATAN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KEDOKTERAN GIGI ; S-1 KEDOKTERAN ; S-1 KEBIDANAN ; S-1 GIZI ; S-1 FARMASI ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN ; D-IV PROMOSI KESEHATAN ; S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN ; S-1 KEPERAWATAN ; S-1 KEDOKTERAN HEWAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
32.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-IV ANALIS KESEHATAN ; D-IV FISIOTERAPI ; D-IV KEBIDANAN ; D-IV KEPERAWATAN ANESTESILOGI ; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN ; D-IV PROMOSI KESEHATAN ; S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN ; S-1 FARMASI ; S-1 FARMASI KLINIS ; S-1 GIZI ; S-1 KEBIDANAN ; S-1 KEDOKTERAN ; S-1 KEDOKTERAN GIGI ; S-1 KEDOKTERAN HEWAN ; S-1 KEPERAWATAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; S-1 PSIKOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD MASOHI BIDANG KEPERAWATAN SEKSI PENDIDIKAN, PENYULUHAN DAN PELATIHAN KESEHATAN
33.	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	S-1 KEDOKTERAN HEWAN ; S-1 KEDOKTERAN ; S-1 KEDOKTERAN GIGI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; D-IV KEPERAWATAN ANESTESILOGI ; D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV FISIOTERAPI ; D-IV ANALIS KESEHATAN ; D-IV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN ; D-IV PROMOSI KESEHATAN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV KEBIDANAN ; S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN ; S-1 FARMASI ; S-1 FARMASI KLINIS ; S-1 GIZI ; S-1 KEBIDANAN ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KEPERAWATAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD MASOHI BIDANG PELAYANAN MEDIS SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN FASILITAS RUMAH SAKIT
34.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK
35.	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 HUKUM ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS HIDUP KELUARGA
36.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN BISNIS INTERNASIONAL ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; S-1 PERDAGANGAN INTERNASIONAL ; S-1	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PERIKLAMAN ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI		
37.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
38.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
39.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN KEPULAUAN BANDA SEKRETARIAT KECAMATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
40.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA
41.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
42.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
43.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN BANDA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
44.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA
45.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMPUTER		DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
46.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
47.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
48.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SERAM UTARA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
49.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI
50.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN PULAU HARUKU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
51.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
52.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS SOSIAL SEKRETARIAT SUB BAGIAN TATA USAHA
53.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI		
54.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
55.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
56.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
57.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
58.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SERAM UTARA BARAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
59.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
60.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN AMAHAI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
61.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOB I SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
62.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER		
63.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEON NILA SERUA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
64.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEHORU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
65.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
66.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT SUB BAGIAN INFORMASI PUBLIK
67.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
68.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
69.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN
70.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN LEIHITU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
71.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
72.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SAPARUA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
73.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SALAHUTU SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
74.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
75.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN NUSALAUT SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
76.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
77.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERIKANAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
78.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
79.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI		
80.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 SASTRA INGGRIS ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN
81.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
82.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TELUK ELPAUTIH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
83.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
84.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
85.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM
86.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
87.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
88.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER		
89.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN KEUANGAN, TATA USAHA DAN PERLENGKAPAN
90.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN KOTA MASOHI SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
91.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI PUBLIK
92.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
93.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
94.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
95.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SAPARUA TIMUR SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
96.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TELUTIH SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
97.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SATUAN POLISI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI		PAMONG PRAJA SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM
98.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN LEIHITU BARAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
99.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 KEPENDUDUKAN ; S-1 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU HUKUM ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT (PROMOSI KESEHATAN) ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI/HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KELUARGA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
100.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI ; D-III KEPELATIHAN OLAHRAGA ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III AKUNTANSI ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
101.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUNTANSI ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ; D-III KEPELATIHAN OLAHRAGA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
102.	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III PLANOLOGI ; D-III KONSTRUKSI SIPIL ; D-III KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-III ARSITEKTUR ; D-III TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-III ALAT BERAT ; D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III TEKNOLOGI SIPIL ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA
103.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
104.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 SOSIOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN KERJA
105.	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 KEUANGAN ISLAM ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 USAHA KOPERASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
106.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
107.	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN ; D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN ; S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN ; S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1 INDUSTRI PETERNAKAN ; S-1 KIMIA ; S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK ; S-1 PENYULUH PETERNAKAN ; S-1 PRODUKSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PETERNAKAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK ; S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK ; D-IV PENYULUH PETERNAKAN		
108.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN TEKNOLOGI REKAYASA ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV POLITIK INDONESIA TERAPAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRIKAL MEKANIK ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMATIKA INDUSTRI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 HUKUM SYARIAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	10	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
109.	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK LOGISTIK ; S-1 TEKNIK MANUFAKTUR ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
110.	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERIKANAN ; D-III MEKANISASI PERIKANAN ; D-III MANAJEMEN BISNIS PERIKANAN ; D-III BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III AGRIBISNIS PERIKANAN ; D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III PERIKANAN TANGKAP ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI ; D-III TEKNIK KOMPUTER ; D-III AKUNTANSI ; D-III TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III TEKNIK PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN ; D-III TEKNIK PENANGANAN PATOLOGI PERIKANAN ; D-III TEKNIK BUDIDAYA PERIKANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERIKANAN BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
111.	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III MEKANISASI PERIKANAN ; D-III MANAJEMEN BISNIS PERIKANAN ; D-III BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III AGRIBISNIS PERIKANAN ; D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III PERIKANAN TANGKAP ; D-III TEKNIK BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III TEKNIK PENANGANAN PATOLOGI PERIKANAN ; D-III TEKNIK PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN ; D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; D-III TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; D-III MANAJEMEN INFORMATIKA ; D-III TEKNIK KOMPUTER ; D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI ; D-III PERIKANAN ; D-III AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERIKANAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PEMBUDIDAYA IKAN
112.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS ; D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI ; D-III TEKNOLOGI GIGI ; D-III AUDIOLOGI ; D-III GIZI ; D-III KEPERAWATAN GIGI ; D-III KEBIDANAN ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III REFRAKSI OPTISI ; D-III AKUPUNTUR ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR ; D-III TERAPI OKUPASI ; D-III TERAPI WICARA ; D-III KESEHATAN GIGI ; D-III KEPERAWATAN ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III FARMASI ; D-III FISIOTERAPI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSU MASOHI BIDANG PELAYANAN MEDIS SEKSI PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS
113.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III AKUPUNTUR ; D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III REFRAKSI OPTISI ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III KESEHATAN GIGI ; D-III KEPERAWATAN GIGI ; D-III KEPERAWATAN ; D-III KEBIDANAN ; D-III GIZI ; D-III FISIOTERAPI ; D-III FARMASI ; D-III AUDIOLOGI ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III TERAPI WICARA ; D-III TERAPI OKUPASI ; D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR ; D-III TEKNOLOGI GIGI ; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
114.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III AUDIOLOGI ; D-III FISIOTERAPI ; D-III FARMASI ; D-III GIZI ; D-III KEBIDANAN ; D-III KEPERAWATAN ; D-III	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		KEPERAWATAN GIGI ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III KESEHATAN GIGI ; D-III TERAPI WICARA ; D-III TERAPI OKUPASI ; D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR ; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS ; D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III AKUPUNTUR		MASYARAKAT
115.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III GIZI ; D-III TERAPI WICARA ; D-III TERAPI OKUPASI ; D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR ; D-III TEKNOLOGI GIGI ; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS ; D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III REFRAKSI OPTISI ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III KESEHATAN GIGI ; D-III KEPERAWATAN GIGI ; D-III KEPERAWATAN ; D-III KEBIDANAN ; D-III FISIOTERAPI ; D-III FARMASI ; D-III AUDIOLOGI ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III AKUPUNTUR	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN RSUD MASOHI BIDANG KEPERAWATAN SEKSI ASUHAN PELAYANAN ETIKA DAN MUTU KEPERAWATAN
116.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III AUDIOLOGI ; D-III FARMASI ; D-III FISIOTERAPI ; D-III GIZI ; D-III KEBIDANAN ; D-III KEPERAWATAN ; D-III KEPERAWATAN GIGI ; D-III KESEHATAN GIGI ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III REFRAKSI OPTISI ; D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN ; D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI ; D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS ; D-III TEKNOLOGI GIGI ; D-III TEKNOLOGI KARDIOVASKULAR ; D-III TERAPI OKUPASI ; D-III TERAPI WICARA ; D-III AKUPUNTUR ; D-III ANALIS KESEHATAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
117.	PENGELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SOSIOLOGI PEDESAAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III KEARSIPAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III PARALEGAL ; D-III SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS HIDUP KELUARGA
118.	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 GEOLOGI ; S-1 REKAYASA SUMBER DAYA AIR ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN ; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR ; S-1 REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU ; S-1 SAINS TANAH ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR ; S-1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 MANAJEMEN ATAU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
119.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KIMIA ; S-1 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN ; S-1 SANITASI LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 GEOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
120.	PENGENDALI KONTEN INTERNET	S-1 REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; S-1 HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH) ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 HUKUM ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT
121.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
122.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 ANTROPOLOGI BUDAYA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NEGERI
123.	PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN ; D-IV KIMIA INDUSTRI ; D-IV KIMIA TERAPAN ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MATERIAL MAJU ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN ; S-1 BIOLOGI ; S-1 FARMASI ; S-1 ILMU PERTANIAN ; S-1 KIMIA ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK MATERIAL ; S-1 TEKNOLOGI PANGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
124.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	D-IV PETERNAKAN ; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI ; S-1	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		AGRONOMI DAN HORTIKULTURA ; S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; S-1 ILMU TANAH ; S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN ; S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN ; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA ; D-IV KESEHATAN HEWAN ; D-IV PENYULUH PERTANIAN ; D-IV SOSIAL EKONOMI PERTANIAN		
125.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III AGROTEKNOLOGI ; D-III AGRONOMI ; D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; D-III PERKEBUNAN ; D-III PENYULUHAN PERTANIAN ; D-III MANAJEMEN AGROBISNIS ; D-III PETERNAKAN ; D-III PROTEKSI TANAMAN ; D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-III ILMU TANAH ; D-III TANAMAN PANGAN ; D-III TEKNIK PERTANIAN ; D-III PEMULIAAN TANAMAN ; D-III MEKANISASI PERTANIAN ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN ; D-III AGRIBISNIS ; D-III AGROEKOTEKNOLOGI ; D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
126.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN ; D-III TEKNIK PERTANIAN ; D-III TANAMAN PANGAN ; D-III SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN ; D-III PENYULUHAN PERTANIAN ; D-III MEKANISASI PERTANIAN ; D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN ; D-III MANAJEMEN AGROBISNIS ; D-III ILMU TANAH ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III AGROTEKNOLOGI ; D-III AGRONOMI ; D-III AGROEKOTEKNOLOGI ; D-III AGRIBISNIS	10	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
127.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
128.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
129.	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
130.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SALAHUTU SEKRETARIAT
131.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT
132.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP SEKRETARIAT
133.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		ILMU POLITIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH		
134.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SAPARUA TIMUR SEKRETARIAT
135.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
136.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 STATISTIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN SEKRETARIAT
137.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD BAGIAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN, PROGRAM DAN KEUANGAN
138.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT
139.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ;	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SERAM UTARA SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN		
140.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN NUSALAUT SEKRETARIAT
141.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEKRETARIAT
142.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 STATISTIK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 SOSIOLOGI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT SEKRETARIAT
143.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT
144.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 PERIKANAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA SEKRETARIAT
145.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT
146.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN		SEKRETARIAT
147.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SAPARUA SEKRETARIAT
148.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 PERIKANAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 SOSIOLOGI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT
149.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEKRETARIAT
150.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI SEKRETARIAT
151.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 PETERNAKAN ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 STATISTIK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT
152.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN KOTA MASOHI SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
153.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN LEIHITU SEKRETARIAT
154.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT
155.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PARIWISATA SEKRETARIAT
156.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH SEKRETARIAT
157.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TELUTIH SEKRETARIAT
158.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR KOB I SEKRETARIAT
159.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SEKRETARIAT
160.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SEKRETARIAT
161.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 PETERNAKAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT
162.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 AKUNTANSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS SOSIAL SEKRETARIAT
163.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
164.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN SERAM UTARA BARAT SEKRETARIAT
165.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 PETERNAKAN ; S-1	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN		
166.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 PERIKANAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PEMERINTAHAN
167.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT
168.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN UMUM
169.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERIKANAN SEKRETARIAT
170.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN ORGANISASI
171.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 SOSIOLOGI ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN LEIHITU BARAT SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		DAN KOTA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 STATISTIK		
172.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT
173.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKANAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
174.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 STATISTIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
175.	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN PULAU HARUKU SEKRETARIAT
176.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKANAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN SEKRETARIAT
177.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKANAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SEKRETARIAT
178.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS KESEHATAN SEKRETARIAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI		
179.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TELUK ELPAPUTHI SEKRETARIAT
180.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEHORU SEKRETARIAT
181.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM
182.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN BANDA SEKRETARIAT
183.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEON NILA SERUA SEKRETARIAT
184.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN KEPULAUAN BANDA SEKRETARIAT KECAMATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK		
185.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 STATISTIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN AMAHAI SEKRETARIAT
186.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ; S-1 MANAJEMEN KEUANGAN ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERIKANAN ; S-1 PETERNAKAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SEKRETARIAT
187.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	SLTA KEJURUAN ; SMK TEKNIK ; SMK ; SMA IPS ; SMA IPA ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	5	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
188.	PRANATA KEWILAYAHAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 EKONOMI KOOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 OSEANOGRAFI ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG TATA RUANG
189.	TEKNISI AKUAKULTUR TERAMPIL	D-III BUDI DAYA IKAN ; D-III BUDIDAYA KELAUTAN ; D-III BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III PERIKANAN BUDIDAYA ; D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN ; D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA ; D-III TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA	1	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PERIKANAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PEMBUDIDAYA IKAN
190.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV JASA KONSTRUKSI ; S-1 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ; D-IV ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK PENGAIRAN ; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ; S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK LISTRIK ; D-IV TEKNIK MESIN ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR	3	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG SUMBER DAYA AIR
191.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	D-IV PERANCANGAN BANGUNAN GEDUNG ; S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT ; D-IV TEKNIK LINGKUNGAN ; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ; D-IV PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV ILMU INFORMATIKA ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ; D-IV JASA KONSTRUKSI	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG CIPTA KARYA
192.	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 REKAYASA SIPIL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG BIDANG BINA MARGA

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian
2. Sekretaris Kementerian
3. Sekretaris Jenderal Lembaga
4. Sekretaris Utama Lembaga
5. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
7. Kepala BKD/BKPSDM/BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: PT.01.03/F/570/2024
TENTANG
PERSYARATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI
DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN TAHUN 2024

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan instansi pembina bagi 30 Jenis Jabatan Fungsional Kesehatan, yaitu: Administrator Kesehatan, Apoteker, Asisten Apoteker, Asisten Penata Anestesi, Bidan, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Entomolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Fisikawan Medis, Fisioterapis, Nutrisionis, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Penata Anestesi, Perawat, Perekam Medis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Psikolog Klinis, Radiografer, Refraksionis Optisien, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Terapis Gigi dan Mulut, dan Terapis Wicara, telah menyusun persyaratan kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR). Sebagai salah satu persyaratan mendaftar CPNS dan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2024.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1310);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Tenaga Kesehatan yang akan mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2024
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,

}{ttd}

drg. Arianti Anaya, MKM

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Wakil Menteri Kesehatan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA
 KESEHATAN
 NOMOR : PT.01.03/F/570/2024
 TENTANG PERSYARATAN KUALIFIKASI
 PENDIDIKAN DAN SURAT TANDA REGISTRASI
 DALAM RANGKA PENGADAAN CALON APARATUR
 SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
 TAHUN 2024

**DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MEMPERSYARATKAN
 KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN STR**

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
1	Administrator Kesehatan	Keahlian	S-1 Sarjana Bidang Kesehatan/ S-1 Profesi Bidang Kesehatan / D-IV/ Sarjana Terapan Bidang Kesehatan: 1. S1 Kedokteran 2. S1 Kedokteran Gigi 3. S1 Psikologi peminatan Psikologi Klinis 4. S1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 4 oktober 2017 dan telah dikukuhkan sebagai Psikolog Klinis 5. S1 Keperawatan 6. S1 Kebidanan 7. S1 Farmasi 8. S1 Kesehatan Lingkungan 9. S1 Gizi 10. S1 Ilmu Gizi 11. S1 Gizi dan Dietetika 12. S1 Gizi Kesehatan 13. S1 Kesehatan Masyarakat 14. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 15. S1 Epidemiologi 16. S1 Kesehatan Kerja		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			17. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
			18. S1 Administrasi Rumah Sakit		
			19. S1 Fisioterapi		
			20. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
			21. S1 peminatan/jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik		
			22. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan		
			23. Diploma IV / Sarjana Terapan Kebidanan		
			24. Diploma IV / Sarjana Terapan Bidan Pendidik		
			25. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi		
			26. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika		
			27. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi Klinis/ Gizi Klinik		
			28. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan		
			29. Diploma IV / Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan		
			30. Diploma IV / Sarjana Terapan Epidemiologi		
			31. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Kerja		
			32. Diploma IV / Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
			33. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
			34. Diploma IV / Sarjana Terapan Promosi Kesehatan		

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			35. Diploma IV / Sarjana Terapan Fisioterapi		
			36. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Wicara dan Bahasa		
			37. Diploma IV / Sarjana Terapan Okupasi Terapi		
			38. Diploma IV / Sarjana Terapan Akupunktur/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal/ Akupunktur dan Pengobatan Herbal		
			39. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan		
			40. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis		
			41. Diploma IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan		
			42. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi		
			43. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Gigi		
			44. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Gigi		
			45. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi dan Mulut		
			46. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi		
			47. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknisi Gigi		
			48. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Elektromedik		
			49. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis		
			50. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi		

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			51. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 52. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 53. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiologi 54. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiologi 55. Diploma IV / Sarjana Terapan Ortotik dan Prostetik 56. Diploma IV / Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional 57. Diploma IV / Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Tiongkok 58. Diploma IV / Sarjana Terapan Sistem Manajemen Informasi Kesehatan 59. Diploma IV / Sarjana Terapan Analisis Kesehatan 60. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis/ Teknologi Laboratorium Medik 61. Profesi Dokter 62. Profesi Dokter Gigi 63. Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 64. Profesi Apoteker 65. Profesi Ners 66. Profesi Bidan 67. Profesi Dietisien 68. Profesi Fisioterapis		
2	Apoteker	Keahlian	Profesi Apoteker	√	
3	Asisten Apoteker	Keterampilan	Diploma III Farmasi	√	
4	Asisten Penata Anestesi	Keterampilan	1. Diploma III Kepenataan Anestesi 2. Diploma III Keperawatan Anestesi	√	

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			3. Diploma III Keperawatan dengan konsentrasi Anestesi dan Gawat Darurat Medik 4. Diploma III Keperawatan yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021		
5	Bidan	Keahlian	1. Profesi Bidan 2. Diploma IV Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan/ Sarjana Sains Terapan Kebidanan (lulusan sampai dengan tahun 2021) 3. Diploma IV Kebidanan/ Sarjana Terapan Kebidanan/Sarjana Sains Terapan Bidan Pendidik/ Prodi Bidan Pendidik (lulusan sampai dengan tahun 2021)	√	
		Keterampilan	Diploma III Kebidanan	√	
6	Dokter	Keahlian	1. Profesi Dokter 2. Profesi Dokter Spesialis 3. Profesi Dokter Subspesialis Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan • Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan 	√	
7	Dokter Gigi	Keahlian	1. Profesi Dokter Gigi 2. Profesi Dokter Gigi Spesialis 3. Profesi Dokter Gigi Subspesialis	√	

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter gigi spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan • Kualifikasi dokter gigi subspesialis merupakan dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan 		
8	Dokter Pendidik Klinis	Keahlian	1. Profesi Dokter Spesialis 2. Profesi Dokter Subspesialis Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk profesi dokter spesialis/ subspesialis, mencantumkan jenis spesialisasi/ subspesialisasinya • Kualifikasi pendidikan relevan dengan tugas dan fungsi satuan kerja penempatan • Kualifikasi dokter subspesialis merupakan dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan 	√	
9	Entomolog Kesehatan	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 2. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan 3. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Sanitasi Lingkungan 4. S1 peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 5. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan /jurusan/program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			6. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Lain 7. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Lain konsentrasi entomologi Kesehatan 8. S1 Kesehatan Lingkungan 9. S2 peminatan/jurusan/program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 10. S2 Kesehatan Lingkungan konsentrasi Entomologi Kesehatan		
		Keterampilan	1. Diploma III Kesehatan Lingkungan peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 2. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Entomologi Kesehatan 3. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Kesehatan Lingkungan 4. Diploma III peminatan/jurusan/ program studi/ konsentrasi Sanitasi 5. Diploma III Sanitasi 6. Akademi Kesehatan Lingkungan	√	
10	Epidemiolog Kesehatan	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Epidemiologi 2. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/ program studi/konsentrasi Epidemiologi 3. S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain 4. S2 Epidemiologi 5. S2 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Epidemiologi		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
		Keterampilan	Diploma III Bidang Kesehatan: 1. Diploma III Pengawas Epidemiologi 2. Diploma III Keperawatan 3. Diploma III Kebidanan 4. Diploma III Farmasi 5. Diploma III Sanitasi 6. Diploma III Kesehatan Lingkungan 7. Diploma III Gizi 8. Diploma III Pengawasan Epidemiologi 9. Diploma III Kesehatan dan Keselamatan Kerja 10. Diploma III Asuransi Kesehatan 11. Diploma III Fisioterapi 12. Diploma III Okupasi Terapi 13. Diploma III Terapi Wicara 14. Diploma III Akupunktur/ Akupuntur 15. Diploma III Teknologi Elektromedis 16. Diploma III Teknik Elektromedik 17. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis 18. Diploma III Analisis Kesehatan 19. Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan 20. Diploma III Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik 21. Diploma III Radiologi 22. Diploma III Teknik Radiologi 23. Diploma III Keperawatan Gigi 24. Diploma III Kesehatan Gigi 25. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 26. Diploma III Teknologi Bank Darah 27. Diploma III Teknik Transfusi Darah 28. Diploma III Refraksi Optisi 29. Diploma III Optometri 30. Diploma III Rekam Medis		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			31. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 32. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 33. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan 34. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 35. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 36. Diploma III Teknik Gigi 37. Diploma III Keperawatan Anestesi 38. Diploma III Kepenataan Anestesi 39. Diploma III Teknisi Kardiovaskuler 40. Diploma III Audiologi 41. Diploma III Jamu 42. Diploma III Pengobat Tradisional/ Pengobatan Tradisional		
11	Fisikawan Medis	Keahlian	1. S1 Fisika Peminatan Fisika Medis 2. S1 Teknik Nuklir Peminatan Fisika Medis 3. Profesi Fisikawan Medik 4. S2 Fisika Peminatan Fisika Medis 5. S2 Fisika Medik		√
12	Fisioterapis	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Fisioterapi 2. Profesi Fisioterapis	√	
		Keterampilan	Diploma III Fisioterapi	√	
13	Nutrisionis	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi 2. Diploma IV/ Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Gizi Klinik 4. Profesi Dietisien		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			5. S1 Gizi 6. S1 Ilmu Gizi 7. S1 Gizi dan Dietetika 8. S2 Gizi		
		Keterampilan	Diploma III Gizi	√	
14	Okupasi Terapis	Keterampilan	1. Diploma III Okupasi Terapi 2. Diploma III Terapi Okupasi	√	
15	Ortotis Prostetis	Keterampilan	1. Diploma III Ortotik dan Prostetik 2. Diploma III Ortotik Prostetik	√	
16	Pembimbing Kesehatan Kerja	Keahlian	1. Diploma IV/ Sarjana Terapan Kesehatan Jurusan/Peminatan/ Program Studi/ Konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Diploma IV/ Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/ konsentrasi lain 5. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 6. S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 7. S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 8. S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 9. S2 Ilmu Kesehatan Kerja 10. S2 Kesehatan Masyarakat K3 11. S2/ Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
17	Penata Anestesi	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Penata Anestesi 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Anestesi Reanimasi 4. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan dengan kompetensi unggulan Keperawatan Anestesi 5. Diploma IV / Sarjana Terapan Perawat yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 6. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan dengan surat keterangan pendamping ijazah Keperawatan Anestesiologi 7. Ners yang memiliki sertifikat pelatihan anestesi sebelum 1 Juni 2021 	√	
18	Perawat	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma IV Keperawatan 2. Profesi Ners 	√	
		Keterampilan	Diploma III Keperawatan	√	
19	Perekam Medis	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Rekam Medis 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan 4. Diploma IV Rekam Medik 5. Diploma IV Perekam dan Informasi Kesehatan 6. Diploma IV Manajemen Informatika Kesehatan 		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			7. S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 8. S1 Rekam Medis 9. S1 Manajemen Informasi Kesehatan 10. S1 Perekam dan Informasi Kesehatan		
		Keterampilan	1. Diploma III Rekam Medis 2. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 3. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 4. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan 5. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 6. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 7. Diploma III Perekam dan Informatika Kesehatan 8. Diploma III Perekam Medis dan Informatika Kesehatan 9. Diploma III Perekam Medis Informatika Kesehatan 10. Diploma III Perekam Medis dan Informatika Kesehatan 11. Diploma III Perekam Medik dan Informatika Kesehatan 12. Diploma III Perekam dan Informasi Kesehatan 13. Diploma III Rekam Medik 14. Diploma III Ilmu Rekam Medis	√	
20	Pranata Laboratorium Kesehatan	Keahlian	1. Diploma IV Analisis Kesehatan 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Analisis Kesehatan		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			3. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik		
			4. Diploma IV / Sarjana Terapan peminatan/ jurusan/program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis		
			5. S1 peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medik		
			6. S1 Farmasi peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis		
			7. S1 peminatan/jurusan/ program studi /konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/ Teknologi Laboratorium Medis		
			8. S1 Biologi		
			9. S1 Kimia		
			10. S1 Teknik Kimia		
			11. S1 Teknik Pangan		
			12. S1 Teknik Lingkungan		
			13. S1 Biokimia		
			14. S1 Biomedik		
			15. S1 Bioteknologi		
			16. S1 Mikrobiologi		
			17. S2 Kimia		
			18. S2 Biokimia		
			19. S2 Biomedik		
			20. S2 Bioinformatika		
			21. S2 Bioteknologi		
			22. S2 Biomolekuler		
			23. S3 Biomolekuler		

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
		Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma III Analisis Kesehatan 2. Diploma III Teknologi Laboratorium Medik 3. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis 4. Diploma III Kimia 5. Diploma III Analisis Kimia 6. Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan 		√
21	Psikolog Klinis	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 Psikologi yang lulus sebelum tanggal 4 oktober 2017 dan telah dikukuhkan sebagai Psikolog Klinis 2. S1 (Sarjana) Psikologi + profesi peminatan Psikologi Klinis 3. Program Profesi Psikologi peminatan Psikologi Klinis 4. S2 Psikologi Profesi Peminatan Psikologi Klinis 		√
22	Radiografer	Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiodiagnostik dan Radioterapi 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan 4. Diploma IV / Sarjana Terapan Teknik Radiologi 5. Diploma IV / Sarjana Terapan Radiologi 	√	
		Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 2. Diploma III Radiodiagnostik dan Radioterapi 3. Diploma III Teknik Radiologi 4. Diploma III Radiologi 5. Diploma III Teknik Rontgen 	√	

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
23	Refraksionis Optisien	Keterampilan	1. Diploma III Refraksi Optisi 2. Diploma III Optometri	√	
24	Teknisi Elektromedis	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan/ Sarjana Sains Terapan Teknik Elektromedik 2. Diploma IV / Sarjana Terapan / Sarjana Sains Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Tekonologi Rekayasa Elektro-medis	√	
		Keterampilan	1. Diploma III Teknik Elektromedik 2. Diploma III Teknologi Elektromedis 3. Diploma III Teknologi Elektro-medis 4. Akademi Teknik Elektromedik	√	
25	Teknisi Gigi	Keterampilan	1. Diploma III Teknik Gigi 2. Diploma III Teknologi Gigi	√	
26	Teknisi Transfusi Darah	Keterampilan	1. Diploma III Teknologi Transfusi Darah 2. Diploma III Teknologi Bank Darah 3. Diploma III Transfusi Darah	√	
27	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku/ Penyuluh Kesehatan Masyarakat (*)	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Promosi Kesehatan 2. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan 3. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 4. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain 5. S2 Promosi Kesehatan 6. S2 Promosi Kesehatan konsentrasi Promosi dan K3 7. S2 Kesehatan Masyarakat		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
		Keterampilan	Diploma Bidang Kesehatan: 1. Diploma III Promosi Kesehatan 2. Diploma III Promosi dan Pendidikan Kesehatan 3. Diploma III Keperawatan 4. Diploma III Kebidanan 5. Diploma III Farmasi 6. Diploma III Sanitasi 7. Diploma III Kesehatan Lingkungan 8. Diploma III Gizi 9. Diploma III Pengawasan Epidemiologi 10. Diploma III Kesehatan dan Keselamatan Kerja 11. Diploma III Asuransi Kesehatan 12. Diploma III Fisioterapi 13. Diploma III Okupasi Terapi 14. Diploma III Terapi Wicara 15. Diploma III Akupunktur/ Akupuntur 16. Diploma III Teknologi Elektromedis 17. Diploma III Teknik Elektromedik 18. Diploma III Teknologi Laboratorium Medis 19. Diploma III Analisis Kesehatan 20. Diploma III Analisis Farmasi dan Makanan 21. Diploma III Ortotik dan Prostetik/ Orthotik Prostetik 22. Diploma III Radiologi 23. Diploma III Teknik Radiologi 24. Diploma III Keperawatan Gigi 25. Diploma III Kesehatan Gigi 26. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 27. Diploma III Teknologi Bank Darah 28. Diploma III Teknik Transfusi Darah 29. Diploma III Refraksi Optisi		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
			30. Diploma III Optometri 31. Diploma III Rekam Medis 32. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan 33. Diploma III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 34. Diploma III Perekam Medis Informasi Kesehatan 35. Diploma III Perekam Medik dan Informasi Kesehatan 36. Diploma III Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 37. Diploma III Teknik Gigi 38. Diploma III Keperawatan Anestesi 39. Diploma III Kepenataan Anestesi 40. Diploma III Teknisi Kardiovaskuler 41. Diploma III Audiologi 42. Diploma III Jamu 43. Diploma III Pengobat Tradisional/ Pengobatan Tradisional		
28	Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Sanitarian (*)	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan 3. S1 Kesehatan Lingkungan 4. S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Kesehatan Lingkungan atau Sanitasi Lingkungan 5. S1 Kesehatan Masyarakat/ S1 Kesehatan Masyarakat peminatan/ jurusan/program studi/konsentrasi Lain		√

No	Jabatan Fungsional	Kategori	Kualifikasi Pendidikan	STR (*)	
				YA	TIDAK
		Keterampilan	1. Diploma III Kesehatan Lingkungan 2. Diploma III Sanitasi 3. Diploma III Akademik Kesehatan Lingkungan	√	
29	Terapis Gigi dan Mulut / Perawat Gigi (*)	Keahlian	1. Diploma IV / Sarjana Terapan Keperawatan Gigi 2. Diploma IV / Sarjana Terapan Kesehatan Gigi 3. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapis Gigi dan Mulut 4. Diploma IV / Sarjana Terapan Terapi Gigi 5. Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan	√	
		Keterampilan	1. Diploma III Keperawatan Gigi 2. Diploma III Kesehatan Gigi 3. Diploma III Terapis Gigi dan Mulut 4. Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma III 5. Akademi Kesehatan Gigi 6. Akademi Keperawatan Gigi	√	
30	Terapis Wicara	Keterampilan	Diploma III Terapi Wicara	√	

Catatan (*):

1. Formasi jabatan fungsional terapis gigi dan mulut yang sebelumnya memiliki nomenklatur perawat gigi belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.
2. Formasi jabatan fungsional tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku yang sebelumnya memiliki nomenklatur penyuluh Kesehatan masyarakat belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.

3. Formasi jabatan fungsional Tenaga sanitasi lingkungan yang sebelumnya memiliki nomenklatur sanitarian belum memiliki penyesuaian Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional, sehingga nomenklatur yang digunakan masih yang lama selama belum ada Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional.
4. STR yang menjadi persyaratan sesuai dengan nomenklatur jabatan yang dilamar.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan,



drg. Arianti Anaya, MKM



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 322 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi;
- b. bahwa Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.

- PERTAMA : Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi sesuai Jabatan yang dilamar.
- KEDUA : Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- KETIGA : Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diunggah pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
- KEEMPAT : Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA.
- KELIMA : Daftar jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 322 TAHUN 2024
 TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI
 UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL
 KESEHATAN DALAM PENGADAAN APARATUR SIPIL
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN
 SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS AHLI	V		<ul style="list-style-type: none"> • STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER AHLI	V		<ul style="list-style-type: none"> • Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter; • STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
3	DOKTER GIGI AHLI	V		<ul style="list-style-type: none"> • Bukan STR Internship bagi Profesi Dokter Gigi; • STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
4	PSIKOLOG KLINIS AHLI	V		
5	PERAWAT AHLI	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	V		
7	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	V		
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	V		
9	PENATA ANESTESI AHLI	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI TERAMPIL	V		
11	BIDAN AHLI	V		
12	BIDAN TERAMPIL	V		
13	APOTEKER AHLI	V		
14	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	V		
15	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI		V	
16	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	
17	FISIOTERAPIS AHLI	V		
18	FISIOTERAPIS TERAMPIL	V		
19	NUTRISIONIS AHLI		V	
20	NUTRISIONIS TERAMPIL	V		
21	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI		V	

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2	3	4	5
22	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU TERAMPIL		V	
23	PEREKAM MEDIS AHLI		V	
24	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	V		
25	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		V	<ul style="list-style-type: none"> Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		V	<ul style="list-style-type: none"> Jika melamar pada fasilitas Kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi pengambilan spesimen biologi/ sampel wajib memiliki STR
27	RADIOGRAFER AHLI	V		
28	RADIOGRAFER TERAMPIL	V		
29	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	V		
30	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI		V	
31	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	V		
32	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	V		
33	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	V		
34	FISIKAWAN MEDIS AHLI		V	
35	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	V		
36	ORTOTIS PROSTETIS TERAMPIL	V		
37	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI		V	
38	TEKNISI GIGI TERAMPIL	V		
39	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	V		
40	TERAPIS WICARA TERAMPIL	V		
41	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI		V	
42	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		V	
43	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	V		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN : FORMAT SURAT LAMARAN CPNS MALUKU TENGAH

PERIHAL : LAMARAN KERJA

KEPADA
YTH. BUPATI MALUKU TENGAH
DI -
M A S O H I

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA LENGKAP : *isikan nama lengkap tanpa gelar*
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : *isikan nama kabupaten/kota, tgl - bln - thn*
JENIS KELAMIN : PRIA/WANITA *)
PENDIDIKAN : SMA/D-III .../S-1.../PROFESI .../S-2 /S-3 *)
FORMASI YANG DILAMAR : TENAGA TEKNIS/TENAGA KESEHATAN *)
JABATAN YANG DILAMAR : *isikan nama jabatan sesuai yang dilamar*
UNIT KERJA PENEMPATAN : *isikan unit kerja penempatan sesuai yang dilamar*
ALAMAT DOMISILI : Desa/Kelurahan ... Kecamatan
NOMOR WA Aktif :

DENGAN INI MENGAJUKAN LAMARAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024 DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERIKUT SAYA LAMPIRKAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN DALAM BENTUK *FILE SCAN* YANG TELAH SAYA UNGGAH PADA *WEBSITE SSCASN* SEBAGAI BERIKUT :

1. PAS FOTO TERBARU, BERWARNA, PAKAIAN FORMAL, LATAR BELAKANG WARNA MERAH.
2. KTP ELETRONIK/SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN E-KTP DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MASIH BERLAKU.
3. SURAT PERNYATAAN 5 POIN YANG TELAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI.
4. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH PENEMPATAN YANG TELAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI E-METERAI.
5. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI TERAKHIR/DAFTAR NILAI SESUAI DENGAN FORMASI JABATAN YANG DILAMAR.
6. SERTIFIKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI.
7. TANGKAPAN LAYAR HASIL PENCARIAN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI PADA WEBSITE BAN-PT.
8. TANGKAPAN LAYAR HASIL PENCARIAN DATA MAHASISWA PADA WEBSITE PDDIKTI.
9. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) BAGI PELAMAR FORMASI TENAGA KESEHATAN UNTUK JABATAN YANG MEMPERSYARATKAN YANG MASIH BERLAKU SAAT PENDAFTARAN.
10. SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN
11. SURAT KETERANGAN SEHAT JASMANI
12. SURAT KETERANGAN BUKAN PENYANDANG DISABILITAS
13. SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH (*khusus untuk pelamar penyandang disabilitas*).
14. VIDEO SINGKAT MELAKUKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN TUGAS SESUAI JABATAN YANG DILAMAR (*khusus untuk pelamar penyandang disabilitas*).

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI SAYA AJUKAN UNTUK DAPAT DIPERTIMBANGKAN. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA DITEMUKAN DATA/DOKUMEN YANG TIDAK BENAR/SESUAI, MAKA SAYA BERSEDIA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI UNTUK MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN ATAU KELULUSAN SAYA DALAM SELEKSI PENGADAAN CPNS DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024.

ATAS PERHATIANNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

....., 2024

HORMAT SAYA,

e-Meterai

ttd

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

*) isikan salah satu pilihan yang sesuai

Catatan :

1. syarat angka 6,7, dan 8 tidak berlaku bagi pelamar dengan ijazah SLTA/sedarajat.
2. syarat angka 9 khusus untuk pelamar formasi tenaga kesehatan.
3. syarat angka 10, 11, dan 12 khusus untuk pelamar jabatan polisi pamong praja pemula.
4. syarat angka 13 dan 14 khusus untuk pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

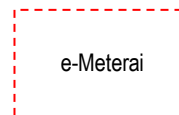
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., 2024

Yang membuat pernyataan,



ttd

(Nama Lengkap Tanpa Gelar)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGAJUKAN PINDAH PENEMPATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah pelamar seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 :

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Status Pernikahan :
Jabatan yang dilamar :
Unit Kerja Penempatan :
Alamat Domisili :
Nomor WA Aktif :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, tidak akan mengajukan pindah tugas/mutasi/pindah penempatan baik dalam daerah maupun keluar daerah dengan alasan pribadi atau alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun Terhitung Mulai Tanggal diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan, bersedia untuk mengundurkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

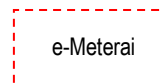
Menyetujui,
Orang Tua/Wali/Suami/Isteri

ttd

(Nama Lengkap)

....., 2024

Yang membuat pernyataan,



ttd

Nama Lengkap

Catatan :

1. bagi yang sudah berkeluarga, disetujui oleh suami/istri
2. bagi yang belum berkeluarga, disetujui oleh orang tua/wali

KOP DINAS

SURAT IZIN MENGIKUTI SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : *wajib diisi nama pejabat setingkat eselon II*
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap :
NI PPPK :
Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Kepada ASN PPPK yang bersangkutan diberikan izin untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dengan pilihan persetujuan *) :

1. Mendaftar dalam Instansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah; atau
2. Mendaftar pada Seluruh Instansi Pemerintah

Demikian surat izin ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024

Kepala Dinas... / Badan ...

Ttd + cap basah

(Nama Lengkap + Gelar)

NIP.

Catatan Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian :

DISETUJUI	TIDAK DISETUJUI	PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH
		Dr. RAKIB SAHUBAWA, S.Pi.,M.Si

Keterangan :

*) *lingkari salah satu angka sesuai pilihan ASN PPPK.*